



Analisis Penetapan Status Hukum Pemeran Film Pornografi Tersangka Atau Korban Dalam Perspektif Kriminologi

Nurul Hakiki¹, Teuku Syahrul Ansari²

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang¹²³

Abstract

Received: 07 Juli 2024

Revised: 16 Juli 2024

Accepted: 20 Juli 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis dilema penetapan status hukum pemeran film pornografi dalam sistem hukum pidana, dengan fokus pada pertanyaan apakah pemeran tersebut harus dianggap sebagai tersangka atau korban. Fenomena ini telah memunculkan perdebatan panjang dan kontroversial dalam ranah hukum dan masyarakat pada umumnya. Dalam konteks kriminologi, penelitian ini berusaha untuk menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hukum terkait dengan status pemeran dalam kasus-kasus film pornografi.

Metode penelitian yang digunakan mencakup yuridis normative dimana Metode penelitian ini berfokus pada analisis teks hukum dan dokumen peraturan yang berkaitan dengan kasus Pendekatan normatif digunakan untuk memeriksa kerangka hukum yang berlaku dalam kasus ini. Penelitian ini mengandalkan analisis dokumen hukum sebagai landasan utama dalam mengevaluasi status hukum pemeran film pornografi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan status hukum pemeran film pornografi merupakan proses yang kompleks dan tidak dapat disederhanakan. Faktor-faktor seperti konteks sosial dan ekonomi, pengaruh psikologis, serta perlindungan hak asasi manusia, semuanya memainkan peran dalam keputusan hukum. Pentingnya memahami bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam konteks kriminologi menjadi perhatian utama penelitian ini.

Keywords: Analisis, Pornografi, Hukum Pidana

(*) Corresponding Author: nurulhakiki93@gmail.com, Teuku.syahrul@fh.unsika.ac.id

How to Cite: Hakiki, N., & Ansari, T. (2024). Analisis Penetapan Status Hukum Pemeran Film Pornografi Tersangka Atau Korban Dalam Perspektif Kriminologi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 800-803. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13744152>

PENDAHULUAN

Penggunaan film pornografi telah menjadi isu yang kompleks dan kontroversial dalam berbagai masyarakat. Hal ini bukan hanya terkait dengan aspek moralitas, tetapi juga dengan masalah hukum yang berkaitan dengan para pemeran dalam film tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, pornografi telah menjadi industri yang berkembang pesat di berbagai negara. Namun, satu pertanyaan penting yang muncul Adalah bagaimana kita harus menentukan status hukum para pemeran dalam film tersebut.

Beberapa pandangan masyarakat dan sistem hukum menganggap para pemeran ini sebagai tersangka yang terlibat dalam aktivitas ilegal, seringkali dikenai hukuman pidana. Sementara itu, ada suara-suara lain yang berpendapat bahwa mereka seharusnya dianggap sebagai korban eksploitasi dan pemaksaan, bukan pelaku kejahatan. Memahami pandangan yang berbeda ini adalah tantangan besar yang perlu dipecahkan.

Dalam konteks ini, studi kriminologi hadir sebagai alat yang sangat berguna untuk menganalisis isu ini. Dengan pendekatan ilmiah, kriminologi dapat memberikan wawasan penting dalam memahami mengapa pandangan masyarakat dan sistem hukum bisa berbeda dalam kasus ini. Dengan landasan teori dan penelitian empiris, kita dapat mendekati permasalahan ini secara lebih objektif dan rasional.

Berdasarkan uraian fakta yang telah dipaparkan di atas, Penulis melakukan penulisan artikel ilmiah dengan judul Mekanisme Penyelesaian Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan Ditinjau Dari Prinsip Good Corporate Governance dan kepastian hukumnya. Dengan fokus pada rumusan permasalahan : bagaimana mekanisme penyelesaian dalam penerapan good corporate governance dan kepastian hukum nya jika terjadi transaksi di dalamnya mengandung benturan kepentingan oleh Direksi yang merugikan Perusahaan?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dimana Metode penelitian ini berfokus pada analisis teks hukum dan dokumen peraturan yang berkaitan dengan kasus Pendekatan normatif digunakan untuk memeriksa kerangka hukum yang berlaku dalam kasus ini. Penelitian ini mengandalkan analisis dokumen hukum sebagai landasan utama dalam mengevaluasi status hukum pemeran film pornografi.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan status hukum pemeran film pornografi, apakah sebagai tersangka atau korban, dapat dijelaskan dari perspektif kriminologi ?
2. Apa faktor-faktor kriminologis yang mempengaruhi keputusan hukum dalam menentukan status pemeran film pornografi dalam kasus pornografi ?
3. Bagaimana penetapan status hukum pemeran film pornografi ini mempengaruhi proses peradilan dan perlindungan hak asasi manusia mereka?

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana penetapan status hukum pemeran film pornografi, apakah sebagai tersangka atau korban, dapat dijelaskan dari perspektif kriminologi?

Penetapan status hukum pemeran film pornografi sebagai tersangka atau korban dapat dijelaskan dari perspektif kriminologi dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Dalam kasus ini, kriminologi dapat melihat bagaimana faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologis berperan dalam memahami mengapa individu terlibat dalam industri pornografi, Serta sesuai pasal Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pasal ini mengatur tentang larangan memproduksi, mendistribusikan, atau mentransmisikan konten pornografi. Pasal ini dapat menjadi dasar hukum untuk menetapkan status hukum pemeran film pornografi sebagai tersangka. Serta Misalnya, kondisi sosial seperti kemiskinan atau tekanan ekonomi dapat mendorong seseorang untuk terlibat dalam industri ini. Aspek psikologis seperti

motivasi dan dorongan seksual juga memainkan peran penting dalam keputusan individu. Kriminologi akan menggali bagaimana faktor-faktor ini memengaruhi status hukum pemeran film pornografi, dan juga perspektif kriminologi dalam penetapan status hukum pemeran film pornografi

Dalam perspektif kriminologi, juga pemeran film pornografi dapat dikategorikan sebagai korban atau tersangka. Pemeran film pornografi dapat dikategorikan sebagai korban jika pemeran tersebut dipaksa untuk melakukan perbuatan cabul atau dipertontonkan dalam keadaan telanjang atau setengah telanjang di muka umum tanpa persetujuan. Pemeran film pornografi dapat dikategorikan sebagai tersangka jika pemeran tersebut secara sukarela melakukan perbuatan cabul atau melakukan perbuatan cabul dengan anak di bawah umur.

2. Apa faktor-faktor kriminologis yang mempengaruhi keputusan hukum dalam menentukan status pemeran film pornografi dalam kasus pornografi ?

Faktor-faktor kriminologis yang memengaruhi keputusan hukum dalam menentukan status pemeran film pornografi dalam kasus pornografi sangat kompleks. Ini dapat melibatkan analisis mendalam tentang bagaimana sistem hukum menilai tingkat keterlibatan pemeran, apakah mereka dianggap sebagai pelaku kejahatan atau korban eksploitasi. Faktor yang memengaruhi keputusan ini dapat mencakup kondisi lingkungan mereka, termasuk apakah mereka dipaksa atau terlibat secara sukarela, sesuai pasal 292 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal ini mengatur tentang larangan melakukan perbuatan cabul dengan orang lain. Pasal ini dapat menjadi dasar hukum untuk menetapkan status hukum pemeran film pornografi sebagai tersangka, jika perbuatan cabul tersebut dilakukan secara paksa atau tidak dengan suka rela. Dan Pasal 296 KUHP Pasal ini mengatur tentang larangan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul. Pasal ini dapat menjadi dasar hukum untuk menetapkan status hukum pemeran film pornografi sebagai korban, jika pemeran tersebut dipaksa untuk melakukan perbuatan cabul. Selain itu, aspek dorongan ekonomi dan tekanan sosial, seperti pengaruh pihak ketiga atau pemerasan juga dapat memengaruhi status hukum. Oleh karena itu, kriminologi dapat membantu dalam menganalisis dan memahami peran faktor-faktor ini dalam pengambilan keputusan hukum.

3. Bagaimana penetapan status hukum pemeran film pornografi ini mempengaruhi proses peradilan dan perlindungan hak asasi manusia mereka?

Pengaruh penetapan status hukum pemeran film pornografi terhadap proses peradilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Penetapan status hukum pemeran film pornografi dapat memengaruhi proses peradilan dan perlindungan hak asasi manusia mereka. Jika pemeran film pornografi ditetapkan sebagai tersangka, maka pemeran tersebut akan menjalani proses hukum. Pemeran tersebut juga dapat dijatuhi hukuman pidana, yang dapat berdampak negatif terhadap kehidupan mereka. Jika pemeran film pornografi ditetapkan sebagai korban, maka pemeran tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia. Pemeran tersebut juga dapat mendapatkan bantuan dan rehabilitasi dari pemerintah.

Penetapan status hukum pemeran film pornografi dapat berdampak signifikan pada proses peradilan dan perlindungan hak asasi manusia mereka. Jika mereka

dianggap sebagai tersangka, mereka akan diperlakukan sesuai dengan hukum pidana, dengan potensi konsekuensi hukum yang serius. Sebaliknya, jika dianggap sebagai korban, mereka mungkin mendapatkan perlindungan hukum yang lebih besar dan bantuan untuk pemulihan. Oleh karena itu, penetapan status hukum ini dapat mempengaruhi hak-hak individu tersebut, seperti hak atas keadilan dan hak atas perlindungan dari eksploitasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa penetapan status hukum pemeran film pornografi sebagai tersangka atau korban melibatkan kompleksitas aspek kriminologis. Faktor-faktor seperti motivasi pelaku, dampak sosial, dan lingkungan memainkan peran kunci dalam pengambilan keputusan hukum. Pentingnya mempertimbangkan perspektif kriminologi dalam konteks ini menjadi jelas, karena hal ini tidak hanya memengaruhi proses peradilan, tetapi juga perlindungan yang diberikan kepada pemeran film pornografi. Rekomendasi untuk perbaikan sistem dan pendekatan yang lebih holistik dapat menjadi langkah positif menuju penanganan yang lebih efektif terhadap kasus-kasus pornografi.

B. Saran

Disarankan untuk meningkatkan pemahaman para penegak hukum dan profesional hukum terkait dinamika kriminologis dalam kasus pemeran film pornografi. Pelatihan yang mendalam dalam aspek kriminologi dapat meningkatkan kepekaan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku para pelaku. Selain itu, perlu adanya kerja sama lintas sektor antara lembaga penegak hukum, psikolog, dan pekerja sosial untuk memberikan pendekatan holistik dalam menanggapi kasus ini. Dalam rangka perlindungan, disarankan untuk mengembangkan kebijakan yang menitik beratkan pada pemulihan dan dukungan bagi pemeran film pornografi yang mungkin menjadi korban eksploitasi. Upaya preventif dan edukatif di masyarakat juga penting untuk mengurangi insiden pornografi yang merugikan. Dengan demikian, integrasi perspektif kriminologi dalam kebijakan dan praktik hukum dapat memperkuat respons yang lebih efektif terhadap kasus-kasus semacam ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ansari, T. S. (2023, Mei 10). *MEKANISME PENYELESAIAN TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DITINJAU DARI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KEPASTIAN HUKUM*. From Open Journal Systems: <https://binapatria.id/index.php/MBI/article/view/317/316>

Perundang-undangan :

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

pasal 292 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)